

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi dan mengeksplorasi pemahaman subjek yang bertanggungjawab dalam pengelolaan aset bersejarah di Kabupaten Banyuwangi berdasarkan pengalamannya. Penelitian ini berfokus untuk mengkaji lebih dalam mengenai perlakuan akuntansi yang diterapkan untuk aset bersejarah di Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur. Baik dari segi pengakuan, pengukuran, penilaian, hingga penyajian dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi. Pendekatan fenomenologi digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh data sesuai dengan realita di lapangan, dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi kepada BPKAD, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Pengelola Museum Blambangan dan Pengelola warisan Budaya di Kabupaten Banyuwangi. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa Kabupaten Banyuwangi belum dapat dikatakan melakukan perlakuan akuntansi aset bersejarah dengan baik sesuai dengan SAP, dikarenakan permasalahan kepemilikan atas aset bersejarah di Kabupaten Banyuwangi. Pengungkapan yang dilakukan selama ini oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi atas aset bersejarah hanya berdasarkan daftar (ODCB) Objek Diduga Cagar Budaya pada Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi. Tak hanya itu rendahnya SDM yang memahami perlakuan akuntansi aset bersejarah menjadikan permasalahan baru dalam pengelolaan aset bersejarah di Kabupaten Banyuwangi. Sehingga, banyak responden baik internal entitas Pemerintah maupun pengelola mengharapkan adanya peran Pemerintah untuk lebih tegas memperhatikan atas kepemilikan dan pengelolaan aset bersejarah dengan melihat kebermanfaatannya untuk masa depan.

**Kata kunci : Warisan Budaya, Aset Bersejarah, Perlakuan Akuntansi, Standar Akuntansi Pemerintah, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.**